

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI *FRAUD*  
DANA DESA SE MERTOYUDAN  
(Studi Empiris Pada Desa Se Mertoyudan)**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Mencapai Derajat Sarjana S-1**



Disusun Oleh :  
**Eka Ferranika Islamiyah**  
NIM. 14.0102.01053

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG  
TAHUN 2018**

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI *FRAUD*  
DANA DESA SE MERTOYUDAN  
(Studi Empiris Pada Desa Se Mertoyudan)**

**SKRIPSI**



**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Magelang**

Disusun Oleh :  
**Eka Ferranika Islamiyah**  
NIM. 14.0102.01053

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG  
KOTA MAGELANG  
TAHUN 2018**

# SKRIPSI

## FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI FRAUD DANA DESA SE MERTOYUDAN

(Studi Empiris pada desa se Mertoyudan)

Dipersiapkan dan disusun oleh:

**Eka Ferranika Islamiyah**

NPM 14.0102.0053

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji  
Pada tanggal **14 Agustus 2018**

Susunan Tim Penguji

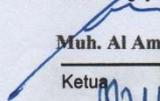
Pembimbing

  
Nur Laila Yuliani, S.E., M.Sc.

Pembimbing I

Pembimbing II

Tim Penguji

  
Muh. Al Amin, S.E., M.Si.

Ketua

  
Nur Laila Yuliani, S.E., M.Sc.

Sekretaris

  
Yulinda Devi Pramita, S.E., M.Sc.

Anggota

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan  
Untuk memperoleh gelar Sarjana S1

Tanggal

  
15 OCT 2018

**Dr. Marlina Kurnia, M.M.**

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis

**Halaman Pernyataan Keaslian**

**SURAT PERNYATAAN**

**Halaman Surat Pernyataan**

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Eka Ferranika Islamiyah

NIM : 14.0102.0053

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Program Studi : Akuntansi

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya susun dengan judul:

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI FRAUD DANA DESA SE  
MERTOYUDAN**

**(Studi empiris pada desa se Mertoyudan)**

adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat dari Skripsi orang lain. Apabila kemudian hari pernyataan Saya tidak benar, maka Saya bersedia menerima sanksi akademi yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaannya).

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan.

Magelang, Agustus 2014

\_\_\_\_\_  
Pembuat Pernyataan,



Ferranika Islamiyah

NIM. 14.0102.0053

## Daftar Riwayat Hidup

Nama : Eka Ferranika Islamiyah  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat, Tanggal Lahir : Magelang, 3 April 1996  
Agama : Islam  
Status : Belum Menikah  
Alamat Rumah : Tidar Dudan RT 03 RW 12 Kota  
Magelang  
Alamat Email : [ekaferranikaislamiah@gmail.com](mailto:ekaferranikaislamiah@gmail.com)  
Pendidikan formal :  
SD (2002-2008) : SDN TIDAR V  
SMP (2008-2011) : SMPN 12 MAGELANG  
SMK (2011-2014) : SMK 2 MAGELANG  
Perguruan Tinggi (2014-2018) : S1 Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah  
Magelang

### **Pendidikan Non Formal :**

- *Basic Listening and Speaking Course* di UMMagelang *Language Center*, Pelatihan Dasar Keterampilan Komputer di UPT Pusat Komputer UMMagelang

### **Pengalaman Organisasi :**

- Anggota Tapak suci dan Komunitas etntreprenuer (2015-2016)

### **Penghargaan :**

- Penulis buku 99 pembidik mimpi.
- Peserta mahasiswa berprestasi 2017.
- Penerima hibah PKM 2018.

## **Motto**

“Allah Tidak Membebani Seseorang Melainkan Dengan Kesanggupannya”

“Sesungguhnya Sesudah Kesulitan Itu Ada Kemudahan”

“Jadi Orang Penting Itu Menyenangkan Tapi Yang Terpenting Adalah Jadi Orang  
Yang Menyenangkan”

“Hal-Hal Yang Baik Selalu Datang Pada Orang-Orang Yang Sabar”

## Kata Pengantar

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah robbil'alamin, segala puji untukmu wahai Robb seluruh alam atas nikmat dan islam dalam hari ini, yang telah melimpahkan segala nikmat dan karunia yang telah engkau karuniakan kepadaku yang tak akan pernah aku mampu untuk menghitungnya. Solawat serta salam segoga senantiasa tercurah kepada uswah hasanah kita, Rosulullah Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan generasi penerus risalah-Nya yang senantiasa istiqomah di jalan-Nya. Dengan semua ridho-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "**Faktor-faktor yang Mempengaruhi Fraud Dana Desa Se Mertoyudan studi empiris pada desa se Mertoyudan**" Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, pengarahan dan dukungan serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penyusun menyampaikan terima kasih kepada:

1. Ir. Eko Muh. Widodo, M. T selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang
2. Dra. Marlina Kurnia, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Magelang
3. Nur Laila Yuliani, S.E, M.Sc selaku Ketua Progam Studi Akuntansi yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya serta nasehat-nasehatnya sehingga skripsi ini dapat terselsaikan.
4. Nur Laila Yuliani, S.E, M.Sc. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya serta nasehat-nasehatnya sehingga skripsi ini dapat terselsaikan.
5. Bapak Muhammad Al Amin S.E, M.Sc selaku penguji skripsi yang telah memberikan arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Ibu Yulinda Devi P S.E, M.Sc. selaku penguji yang telah memberikan arahan sehingga skripsi saya dapat terselaisaikan.

7. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan bekal ilmu dan telah membantu kelancaran selama menjalankan studi di Universitas Muhammadiyah Magelang
8. Keluarga tercinta yang telah memberikan keceriaan, semangat dan doa.
9. Para perangkat Desa se Kecamatan Mertoyudan atas kesediaannya sebagai responden dalam penulisan skripsi ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Magelang, Agustus 2018  
 Peneliti



Eka Ferranika Islamiyah  
 NIM 14.0102.0053

## Daftar Isi

Halaman Judul .....	i
Halaman Pengesahan .....	i
Lembar Persetujuan.....	ii
Pernyataan Keaslian .....	iii
Motto .....	iv
Kata Pengantar .....	v
Daftar Isi.....	vi
Daftar Tabel .....	viii
Daftar Gambar.....	ix
Daftar Lampiran .....	x
Abstrak .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kontribusi Penelitian .....	9
E. Sistematika Pembahasan .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS</b>	
A. Telaah Teori .....	12
1. Teori <i>triangel fraud</i> .....	13
2. Teori <i>Kohlberg</i> .....	15
3. Kecurangan.....	16
4. Keefektivan Pengendalian Internal .....	17
5. Kesesuaian Kompensasi .....	18
6. Ketaatan aturan akuntansi .....	18
7. Penegakan hukum .....	19
8. Budaya etis .....	23
B. Telaah Penelitian Sebelumnya .....	21
C. Perumusan Hipotesis .....	27
D. Model Penelitian .....	37
<b>BAB III METODA PENELITIAN</b>	
A. Populasi dan Sampel .....	38
B. Data Penelitian .....	39
C. Variabel dan Pengukuran Variabel.....	40
D. Metoda Analisis Data .....	42
E. Pengujian Hipotesis.....	45
1. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	45
2. Uji F.....	45
3. Uji t.....	46
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Sampel Penelitian.....	48
B. Statistik Deskriptif Responden.....	49
C. Deskriptif Variabel Penelitian .....	50
D. Uji Kualitas Data.....	52

1.	Uji Validitas .....	52
2.	Uji Reliabilitas.....	54
E.	Analisis Regresi Linier Berganda.....	55
F.	Uji Hipotesis .....	55
1.	Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	56
2.	Uji F.....	55
3.	Uji t.....	56
G.	Pembahasan .....	61
<b>BAB V KESIMPULAN</b>		
A.	Kesimpulan.....	70
B.	Keterbatasan Penelitian .....	61
C.	Saran.....	71

## Daftar Tabel

Tabel 1.1 Rincian Alokasi Dana Desa Kabupaten Magelang .....	2
Tabel 1.2 Rincian Dana Desa .....	3
Tabel 2.1 Telaah Penelitian Sebelumnya .....	23
Tabel 3.1 Definisi dan Pengukuran variabel .....	41
Tabel 4.1 Sampel penelitian .....	48
Tabel 4.2 Profil Responden .....	49
Tabel 4.3 Statistik deskriptif .....	50
Tabel 4.4 <i>Cross Loading</i> .....	53
Tabel 4.5 Hasil uji reliabilitas .....	54
Tabel 4.6 Hasil regresi linier berganda .....	55
Tabel 4.7 Hasil uji $R^2$ .....	56
Tabel 4.8 Hasil uji F .....	56
Tabel 4.9 Hasil uji t .....	58

## Daftar Lampiran

Lampiran 1. Kuesioner.....	75
Lampiran 2. Daftar desa di Mertoyudan .....	81
Lampiran 3. Daftar sampel di Mertoyudan .....	82
Lampiran 4. Profil Responden .....	83
Lampiran 5. Tabulasi Data Mentah.....	84
Lampiran 6. Tabulasi Data Diolah .....	91
Lampiran 7. Statistik Deskriptif.....	98
Lampiran 8. Uji Validitas.....	99
Lampiran 9 Uji Reliabelitas .....	104
Lampiran 10 Regresi Linear.....	106
Lampiran 11. Penyebaran Kuesioner .....	107

## **ABSTRAK**

### **FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI FRAUD DANA DESA SE MERTOYUDAN**

**(Studi pada desa se Mertoyudan)**

**Oleh :**

**Eka Ferranika Isamiyah**

Penelitian ini bertujuan bertujuan untuk menguji keefektivan pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi, moralitas individu, kesesuaian kompensasi, penegakan hukum, dan budaya etis terhadap *fraud* di desa se Kecamatan Mertoyudan. Sampel pada penelitian ini sebanyak 34 eksemplar dengan menggunakan teknik purposive sampling. Penelitian ini menggunakan pengolahan data SPSS 21 dengan alat analisis regresi berganda. Pengujian menunjukkan bahwa ketaatan aturan akuntansi berpengaruh positif terhadap *fraud*. Sedangkan, Efektivitas pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap *fraud*. moralitas individu, kesesuaian kompensasi, penegakan hukum, dan budaya etis tidak mempengaruhi *fraud*.

**Kata Kunci :** Keefektivan Pengendalian Internal, Ketaatan Aturan Akuntansi, Moralitas Individu, Kesesuaian Kompensasi, Penegakan Hukum, dan Budaya etis, serta *Fraud*

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

*Fraud* merupakan representasi tentang fakta material yang palsu dan sengaja atau ceroboh sehingga diyakini serta ditindaklanjuti oleh korban Wulandari, dkk (2017). *The Association of Certified Fraud Examiner (ACFE)* mengklasifikasikan *fraud* dalam beberapa klasifikasi seperti penyimpangan atas *asset*, pernyataan palsu, dan korupsi. Konsep kecurangan (*fraud*) seperti penyimpangan dari prosedur akuntansi yang seharusnya diterapkan dalam suatu entitas (Chandra dan Ikhsan, 2015).

Peraturan Pemerintah tentang dana desa disahkan dalam UU Nomor 6 Tahun 2014. Peraturan tersebut mengenai peningkatan kualitas hidup masyarakat desa. Data Kementerian Keuangan Republik Indonesia setiap tahun pemerintah pusat telah menganggarkan dana desa yang cukup besar untuk diberikan kepada desa. Pada tahun 2015, dana Desa dianggarkan sebesar Rp 20,7 triliun dengan rata-rata setiap desa mendapatkan alokasi sebesar Rp 280 juta. Pada tahun 2016, dana desa meningkat menjadi Rp 46,98 triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp 628 juta dan di tahun 2017 kembali meningkat menjadi Rp 60 Triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp 800 juta ([www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)). Kabupaten Magelang merupakan kabupaten yang memiliki 21 kecamatan dengan jumlah dana desa sebesar Rp 289.613.899.000. Berikut ini dana desa Kabupaten Magelang setiap kecamatan.

Tabel 1.1  
 Anggaran Dana Desa  
 Kabupaten Magelang

No	Kecamatan	Jumlah Dana
1	Salaman	15.859.241.000
2	Borobudur	15.659.696.000
3	Ngluwar	6.266.185.000
4	Salam	9.311.645.000
5	Srumbung	13.175.805.000
6	Dukun	11.680.921.000
7	Sawangan	11.985.140.000
8	Muntilan	10.251.655.000
9	Mungkid	11.069.661.000
10	Mertoyudan	9.733.870.000
11	Tempuran	11.903.620.000
12	Kajoran	22.632.111.000
13	Kaliangkrik	16.090.053.000
14	Bandongan	11.275.453.000
15	Candimulyo	14.869.864.000
16	Pakis	15.947.180.000
17	Ngablak	12.576.628.000
18	Grabag	22.330.204.000
19	Tegalrejo	16.116.194.000
20	Secang	14.943.900.000
21	Windusari	15.934.873.000
<b>Jumlah</b>		<b>289.613.899.000</b>

Sumber :Peraturan Bupati Magelang nomor 8 tahun 2017

Pengalokasian dana desa diperlukan pengawasan dan kontrol yang baik oleh pihak internal ataupun eksternal. Pertengahan tahun 2017 kasus *fraud* juga terjadi ditingkat pusat oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Sekretaris Jenderal Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) terkait kasus suap terhadap pejabat Badan Pemeriksa Keuangan RI terkait dengan

pemberian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) di Kemendes PDTT tahun 2016 (bpk.go.id). Kasus ini mengisyaratkan bahwa *fraud* berada ditingkat pusat. Tabulasi data *Indonesia Corruption Watch (ICW)* tentang *fraud* dana desa semenjak tahun 2016-2017 ditemukan 110 kasus yang berkaitan dengan kecenderungan *fraud* (antikorupsi.org). Sedangkan, KP2KKN Jawa Tengah tahun 2016 menyatakan hanya ada dua kabupaten yang dinyatakan bersih dari korupsi yaitu Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Blora. Penilaian tersebut mengisyaratkan bahwa Kabupaten Magelang merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum bebas dari tindak korupsi.

Kecamatan Mertoyudan merupakan kecamatan yang memiliki dana desa yang terkecil diantara kecamatan-kecamatan yang berada di Kabupaten Magelang. Berikut ini dana desa yang diperoleh desa se Mertoyudan tahun 2017.

Tabel 1.2  
Rincian Dana Desa

No	Desa	Alokasi Per Desa
1	Deyangan	810.026.000
2	Pasuruhan	819.282.000
3	Donorojo	788.214.000
4	Kalinegoro	842.145.000
5	Jogonegoro	802.025.000
6	Sukorejo	796.848.000
7	Bondowoso	800.916.000
8	Danurejo	807.181.000
9	Banyurojo	839.284.000
10	Banjarnegoro	804.163.000
11	Bulurejo	773.651.000
12	Mertoyudan	850.135.000
<b>Jumlah</b>		<b>9.733.870.000</b>

Sumber : Peraturan Bupati Magelang nomor 8 tahun 2017

Ratnayani, dkk (2014) mengatakan bahwa efektivitas pengendalian internal digunakan untuk mengontrol kegiatan operasional suatu instansi. Kegiatan operasional diperlukan pengontrolan dikarenakan untuk mengurangi penyelewengan terhadap *assets* suatu instansi. Pentingnya pengendalian internal dalam mengalokasikan dana desa juga konsisten dengan penelitian yang dilakukan (Puspasari dan Suwardi, 2016). Selain itu, penelitian mengenai kecurangan dilakukan oleh Najahningrum, (2013) dengan persepsi pegawai Dinas Provinsi DIY ditemukan hubungan negatif antara keefektivan pengendalian internal terhadap kecenderungan *fraud*. Keefektivan pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kecenderungan *fraud*, hal ini juga dikatakan oleh Permana, (2017) dalam penelitian di BPKP. Hal ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Adinda dan Ikhsan, (2015) dengan hasil pengendalian internal berpengaruh negatif terjadinya *fraud*.

Kesesuaian kompensasi merupakan faktor untuk pemicu tindak kecurangan serta kerugian dalam suatu instansi. Kompensasi yang tinggi akan memicu karyawan dan termotivasi dalam melakukan pekerjaan dan memberikan yang terbaik untuk instansi tersebut. Hal ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh (Wijaya dkk, 2017) di LPD Kecamatan Gerogak. Kesesuaian kompensasi memiliki pengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi (*fraud*) hal ini dikatakan oleh Wulandari dkk, (2017) dalam penelitiannya mengenai kecenderungan kecurangan akuntansi dengan persepsi Dinas Keuangan Kabupaten Sragen. Hal ini

konsisten dengan penelitian yang dilakukan Chandra dan Ikhsan, (2015) mengenai kecenderungan *fraud* di Dinas Se Grobogan.

Budaya etis dapat meminimalisir kecenderungan kecurangan dalam suatu instansi. Robbins (2002:283) dalam (Zelmiyanti dan Anita, 2015) mengatakan Budaya sendiri berfungsi sebagai pembentuk rasa dan mekanisme pengendalian yang memberikan panduan dan bentuk perilaku serta sikap karyawan. Budaya organisasi yang lemah akan menimbulkan tingkat kecurangan yang besar dalam suatu instansi. Hal ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh (Susandra dan Hartina, 2017) Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Bogor. Adinda dan Ikhsan, (2015) mengatakan bahwasanya budaya etis berpengaruh negatif terhadap kecurangan di Sektor Pemerintahan Kabupaten Klaten. Hal ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Susandra dan Hartina, (2017) di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Bogor.

Hal terpenting lainnya yang mempengaruhi kecurangan (*fraud*) adalah adanya aturan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan. Penyusunan laporan tersebut dicatat sesuai dengan transaksi sehingga menghasilkan laporan keuangan yang wajar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Ketaatan aturan akuntansi pada suatu instansi akan menghasilkan laporan keuangan yang andal, relevan, dan wajar (Dwi, dkk 2017). Putu, (2017) dalam penelitiannya mengenai Lembaga Perkreditan Desa di kabupaten buleleng mengenai kecenderungan kecurangan bahwa ketaatan aturan akuntansi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan.

Hal ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Downida dan Riharjo, (2017) mengenai kecenderungan kecurangan di SKPD Kota Kediri.

Penegakan hukum di sektor publik tidak kalah penting untuk mengurangi akuntansi (*fraud*). Pentingnya penegakan hukum dikarenakan 79% pelaku dihukum lebih rendah dari tuntutan penuntut umum. Oleh karena itu, penegakan hukum sangatlah penting untuk mengurangi kecenderungan *fraud* ([inspektorat.jatengprov.go.id](http://inspektorat.jatengprov.go.id)). Hal tersebut konsisten dengan penelitian yang dilakukan Chandra dan Ikhsan (2015). Penegakan hukum berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan (Adinda dan Ikhsan, 2015) studi empiris di sektor pemerintahan Kabupaten Klaten. Hal ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh (Susandra dan Hartina, 2017) dengan studi empiris di SKPD Kota Bogor. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Wulandari dkk, (2017) mengatakan bahwasanya penegakan hukum berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan di sektor pemerintahan. Hasil penelitian ini dikarenakan setiap instansi pemerintah memiliki ketaatan hukum yang berbeda.

Hasil penelitian tersebut sangatlah beragam dikarenakan adanya beberapa hal seperti tingkat kepatuhan terhadap penegakan yang sangatlah beragam antara organisasi pemerintah yang satu dengan yang lainnya. Selain itu, perbedaan kompetensi dalam penyusunan laporan keuangan yang dilakukan individu. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian terdahulu dengan menggunakan faktor-faktor yang terdiri dari efektivitas

pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi, moralitas individu, dan penegakan hukum.

Penelitian tentang faktor-faktor kecenderungan akuntansi (*fraud*) sangatlah penting dikarenakan penelitian tersebut mampu mengetahui penyebab *fraud* yang berada ditingkat pusat maupun daerah. Selain itu, dengan adanya penelitian-penelitian terhadap kecenderungan *fraud* diharapkan adanya pencegahan tindak kecurangan.

Penelitian ini mengembangkan dari penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh (Permana, 2017) mengenai determinan *fraud* di BPKP. Persamaan penelitian ini sama-sama meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi *fraud*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah **pertama** penelitian ini menambahkan variabel berupa ketaatan aturan akuntansi *fraud*.

Penambahan variabel aturan akuntansi dikarenakan Standar akuntansi pemerintahan (SAP) dibuat sebagai upaya untuk penyeragaman laporan keuangan yang bertujuan untuk memudahkan pemeriksaan guna meminimalisir terjadinya kecurangan (Sari, dkk 2015). Hasil ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh (Puspasari dan Suwardi, 2016) di Pemerintahan daerah, bahwasanya aturan akuntansi mampu memberikan laporan keuangan yang wajar dan mampu digunakan untuk pengambilan keputusan. Keputusan tersebut dapat digunakan untuk instansi, DPRD, dan masyarakat.

**Kedua** penelitian ini menambahkan variabel berupa penegakan hukum yang mempengaruhi *fraud*. Penegakan hukum yang tegas tentunya akan mengurangi tindak kecurangan akuntansi. Penegakan hukum mampu memberikan kesadaran dan mampu berjalan sesuai dengan mestinya (Adi dkk, 2016). Pentingnya penegakan hukum dikarenakan 79% pelaku ditindak pidana kurang dari apa yang telah dilakukannya (inspektorat.jatengprov.go.id). Perbedaan tersebut mengacu pada penelitian Downida dan Riharjo, (2017) dan Wulandari dkk, (2017).

**Ketiga** penelitian ini dilakukan di desa se Mertoyudan. Penelitian ini dengan objek desa se Mertoyudan dikarenakan kecamatan ini memperoleh dana desa terkecil. Hasil penilaian laporan perkembangan kegiatan APBD memperoleh nilai A pada tertib laporan dan pemeriksaan fisik. Namun kinerja keuangan pada kecamatan ini peringkat ke 15 diantara 21 kecamatan (PPID.Magelangkab.go.id). Selain itu, tabulasi data Badan Pusat Statistik menyatakan bahwa 4.130 jiwa dari 157.200 jiwa penduduk di Kabupaten Magelang masih berada ditaraf tidak mampu. Berdasarkan Peraturan Bupati nomor 8 Tahun 2018 menyatakan bahwa 50% alokasi dana desa diperuntukkan untuk mensejahterakan rakyat. Hal ini mengisyaratkan pengalokasian untuk dana desa masih belum maksimal di desa se Mertoyudan.

## **B. Rumusan Masalah**

Kasus mengenai *fraud* dana desa yang semakin banyak maka penelitian ini berfokus untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut :

1. Apakah efektivitas pengendalian internal berpengaruh terhadap *fraud*?
2. Apakah ketaatan aturan akuntansi berpengaruh terhadap *fraud*?
3. Apakah moralitas individu berpengaruh terhadap *fraud*?
4. Apakah kesesuaian kompensasi berpengaruh terhadap *fraud*?
5. Apakah penegakan hukum berpengaruh terhadap *fraud*?
6. Apakah budaya etis berpengaruh terhadap *fraud*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari diakannya penelitian ini adalah

1. Menguji secara empiris pengaruh efektivitas pengendalian internal terhadap *fraud*.
2. Menguji secara empiris pengaruh ketaatan aturan akuntansi terhadap *fraud*.
3. Menguji secara empiris pengaruh moralitas individu dengan terhadap *fraud*.
4. Menguji secara empiris pengaruh kesesuaian kompensasi terhadap *fraud*.
5. Menguji secara empiris pengaruh penegakan hukum terhadap *fraud*.
6. Menguji secara empiris pengaruh budaya etis terhadap *fraud*.

## **D. Kontribusi Penelitian**

### 1. Teoritis

- a. Praktisi Dari hasil penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi masyarakat dan bagi peneliti terhadap bukti empiris dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kecurangan (*fraud*).
- b. Dari hasil penelitian diharapkan dapat menambah sumber referensi dalam mengurangi kecurangan.

### 2. Praktisi

Penelitian ini memberikan pengetahuan bagi pemerintah bahwa pemerintah dapat memberikan Undang-Undang yang cocok untuk hal kecurangan terutama organisasi ditingkat daerah

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika dalam penulisan skripsi ini dijelaskan sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan bagian awal dalam penulisan yang menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini akan dijelaskan mengenai landasan teori dan tinjauan umum mengenai penelitian terdahulu yang relevan dan mendukung penelitian, dilanjutkan dengan kerangka pemikiran dan pengembangan hipotesis penelitian.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini menguraikan penelitian yang memuat variabel penelitian definisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, dan metode pengumpulan data dan metode analisis.

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini beisikan pembahasan mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan. Hal tersebut mencakup diskripsi mengenai objek penelitian, analisis data, dan pembahasan hasil penelitian. Hasil penelitian ini akan dilakukan secara mendalam.

### **BAB V KESIMPULAN**

Bab ini berisikan penjelasan mengenai kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya. Selain itu, disajikan keterbatasan atas penelitian dan saran yang dapat menjadi pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.

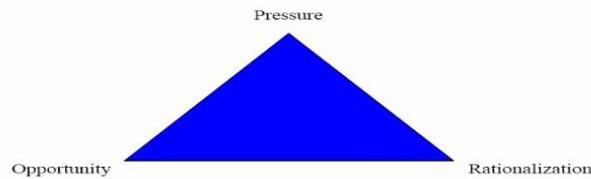
## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

#### A. Tinjauan Pustaka

##### 1. Teori *Triangel Fraud*

Donald Cressey (1950) mengemukakan hipotesis mengenai *fraud triangle* untuk menjelaskan alasan mengapa orang melakukan *fraud*. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, menemukan bahwa orang melakukan *fraud* ketika mereka memiliki masalah keuangan yang tidak bisa diselesaikan bersama tersebut bisa diselesaikan secara diam-diam dengan jabatan/pekerjaan yang mereka miliki dan mengubah pola pikir dari konsep mereka sebagai orang yang dipercayai memegang aset menjadi konsep mereka sebagai pengguna dari aset yang dipercayakan kepada mereka. Teori ini juga mengemukakan bahwa banyak dari pelanggar kepercayaan ini mengetahui bahwa tindakan yang mereka lakukan merupakan tindakan yang ilegal, tetapi mereka berusaha memunculkan pemikiran bahwa apa yang mereka lakukan merupakan tindakan yang wajar. Dari penjelasan di atas, diungkapkan bahwa ada 3 faktor yang mendukung seseorang melakukan *fraud*, yaitu *pressure* (dorongan), *opportunity* (peluang), dan *rationalization* (rasionalisasi). Sebagaimana tergambar berikut ini:



**a. *Pressure***

*Pressure* (tekanan) memiliki berbagai arti, diantaranya keadaan dimana kita merasa ditekan, kondisi yang berat saat kita menghadapi kesulitan, sesuatu yang dapat membuat kita meningkatkan perhatian dalam melakukan tindakan, meningkatkan ingatan dan kemampuan untuk mengingat. Dengan kata lain, *Pressure* dapat meningkatkan kinerja, akan tetapi di lain pihak dapat menjadi salah satu sumber dari munculnya *fraud* dan akhirnya menjadi salah satu elemen dari *fraud triangle*. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan *pressure* adalah sebuah dorongan yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan *fraud*. Contohnya hutang atau tagihan yang menumpuk, gaya hidup mewah, ketergantungan narkoba, dan lain-lain. Pada umumnya yang mendorong terjadinya *fraud* adalah kebutuhan atau masalah *financial*, tapi banyak juga yang hanya terdorong oleh keserakahan.

**b. *Opportunity***

*Opportunity* adalah peluang/kesempatan yang dapat kita pahami sebagai situasi dan kondisi yang ada pada setiap orang atau individu. Situasi dan kondisi tersebut memungkinkan seseorang bisa berbuat atau melakukan kegiatan yang memungkinkan *fraud* terjadi. Biasanya disebabkan karena internal kontrol suatu organisasi yang lemah,

kurangnya pengawasan, dan atau penyalahgunaan wewenang. Di antara 3 elemen *fraud triangle*, *opportunity* merupakan elemen yang paling mendasari terjadinya kecurangan. Peluang ini dapat muncul kapan saja, sehingga pengawasan dan kontrol internal perusahaan sangat diperlukan untuk mengantisipasi kemungkinan adanya peluang seseorang melakukan kecurangan. Seseorang yang tanpa tekanan sekalipun dapat melakukan kecurangan dengan adanya peluang ini, meskipun pada awalnya tidak ada peluang untuk melakukan ini.

**c. *Rationalization***

*Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)* menyebutkan bahwa faktor ketiga terjadinya sebuah *fraud* adalah rasionalisasi. Secara garis besar rasionalisasi dapat diartikan sebagai tindakan yang mencari alasan pembenaran oleh orang-orang yang merasa dirinya terjebak dalam suatu keadaan yang buruk. Pelaku akan mencari alasan untuk membenarkan kejahatan untuk dirinya agar tindakan yang sudah dilakukannya dapat diterima oleh masyarakat. Menurut Spillane (2003) rasionalisasi adalah sebuah gaya hidup dalam masyarakat yang tidak sesuai dengan prinsip yang menyatukan. Secara tidak langsung rasionalisasi menyediakan cara untuk membenarkan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan keadaan yang ada. Cara berasionalisasi yang sering terjadi adalah memindahkan kebenaran dasar sejajar dengan prestasi yang tidak tepat, namun sebaliknya rasionalisasi ini hanya akan menghasilkan penghargaan diri yang palsu. Para pakar sosiolog merujuk

pada proses di mana peningkatan jumlah tindakan *social* menjadi berdasarkan pertimbangan efisiensi perhitungan bukan pada motivasi yang berasal dari moralitas, emosi, kebiasaan atau tradisi.

Rasionalisasi menjadi elemen penting dalam terjadinya *fraud*, dimana pelaku mencari pembenaran atas tindakannya, misalnya: (a) bahwa tindakannya untuk membahagiakan keluarga dan orang-orang yang dicintainya, (b) masa kerja pelaku cukup lama dan dia merasa seharusnya berhak mendapatkan lebih dari yang telah dia dapatkan sekarang (posisi, gaji, promosi, dan lain-lain),(c) perusahaan telah mendapatkan keuntungan yang sangat besar dan tidak mengapa jika pelaku mengambil bagian sedikit dari keuntungan tersebut.

## **2. Teori Perkembangan Moral**

Teori perkembangan moral yang dikemukakan oleh Kohlberg (1971) mempunyai pandangan bahwa penalaran moral merupakan landasan perilaku etis. Terdapat tiga tahapan dalam perkembangan moral seseorang. Tahapan pertama (*pre-conventional*) yaitu tahapan yang paling rendah, individu cenderung bertindak karena tunduk dan takut pada hukum. Serta pada level ini individu menganggap bahwa kepentingan pribadi lebih penting. Hal ini sangat rentan terjadinya *fraud*. Pada tahap kedua (*conventional*) individu memiliki dasar pertimbangan moral yang berkaitan dengan pemahaman hukum, aturan sosial masyarakat, kewajiban, dan keadilan lingkungan sosial. Individu pada level tersebut akan mematuhi norma dan menghindari perbuatan yang merugikan lingkungan. Tahap ketiga semakin tinggi moral individu dalam melakukan

tindakan kecurangan maka ia akan menghindari apa yang merugikan diri sendiri dan orang lain.

Penyimpangan terhadap moral menjadi dasar terjadinya *fraud*. Rasionalisasi yang tidak sejalan dengan dengan aturan yang berlaku dalam organisasi akan mendorong seseorang melakukan tindakan yang melanggar aturan.

### 3. *Fraud*

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) menjelaskan kecurangan akuntansi sebagai berikut :

- a. Salah saji yang timbul dari kecurangan dalam pelaporan keuangan yaitu salah saji atau penghilangan secara sengaja jumlah atau pengungkapan dalam Laporan Keuangan untuk mengelabui pemakai Laporan Keuangan.
- b. Salah saji yang timbul dari perlakuan yang tidak semestinya terhadap aktiva (seringkali disebutkan dengan penyalahgunaan atau penggelapan) berkaitan dengan pencurian aktiva entitas yang berakibat Laporan Keuangan tidak disajikan sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang berlaku Umum di Indonesia atau GAAP (*General Accepted Accounting Principles*). Menurut *the Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE), *Internal Fraud* (tindakan penyelewengan didalam perusahaan atau institusi) dikelompokan menjadi 2 (tiga) yaitu

(1) Pernyataan atau pelaporan yang menipu atau dibuat salah (*fraudulent statement*).

(2) Korupsi (*corruption*) (Fitrawansyah 2014:9).

ACFE membagi jenis tindakan korupsi menjadi 2 kelompok

(a) Konflik kepentingan (*conflict of interest*) merupakan benturan kepentingan.

(b) Menyuap atau menerima suap, imbal-balik (*briberies and excoiation*) suap, apapun jenisnya dan kepada siapapun, adalah tindakan *fraud*.

Indikasi kecurangan selalu ditemukan dalam berbagai sektor baik sektor publik, maupun sektor sosial korporasi. *Fraud* yang terjadi pada sektor publik membawa dampak yang luas. Hal ini dikarenakan *fraud* yang terjadi pada sektor tersebut mengakibatkan kerugian yang harus diderita masyarakat umum dan bukan hanya diderita oleh sekelompok orang seperti pemegang saham atau donatur. Umumnya kecurangan akuntansi yang sering terjadi yaitu korupsi. Dalam korupsi, tindakan yang lazim dilakukan diantaranya adalah memanipulasi pencatatan, penghilangan dokumen, dan *mark-up* yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

#### **4. Efektivitas Pengendalian Internal**

Dewan Pengawasan Intern yang terkandung dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 tahun 2008 tentang Keefektifan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah adalah seluruh proses kegiatan

audit, *review*, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik.

Kegagalan pemerintah dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan Keuangan dapat diakibatkan oleh beberapa hal antara lain penyimpangan kebijakan yang diakibatkan oleh kecurangan (*fraud*). Penyimpangan kebijakan dilakukan oleh manajemen puncak terutama untuk mencapai tujuan tertentu, dengan cara membuat kebijakan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sedangkan, penyimpangan kecurangan dapat dilakukan baik manajemen puncak maupun pegawai lainnya dengan untuk mendapatkan keuntungan, dengan cara melakukan tindakan-tindakan kriminal. Sistem pengendalian intern memiliki komponen yang terkait satu sama lain, yaitu : lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, serta informasi dan komunikasi. Apabila dari komponen-komponen tersebut dapat dilakukan dengan baik secara efektif dan efisien, maka akan terhindar dari masalah *fraud* sehingga suatu organisasi akan mencapai tujuan.

## **5. Kesesuaian Kompensasi**

Kesesuaian kompensasi merupakan persepsi karyawan tentang sesuatu yang dipertimbangkan sebagai suatu yang sebanding. Kompensasi

seperti hadiah yang bersifat uang merupakan kompensasi yang diberikan pegawai sebagai penghargaan dari pelayanan mereka (Wulandari,dkk 2017). Menurut Hasibuan (2007) kompensasi dibedakan menjadi dua yaitu kompensasi langsung (*direct compensation*) berupa gaji, upah, dan insentif sedangkan kompensasi tidak langsung (*indirect compensation* atau *employee welfare* atau kesejahteraan karyawan). Kompensasi bentuk uang artinya kompensasi dibayar dengan sejumlah uang kartal kepada karyawan yang bersangkutan. Pemberian kompensasi mampu meminimalisir tindak kecurangan pada suatu instansi (Wijaya,dkk 2017).

#### **6. Ketaatan Aturan Akuntansi**

Standar akuntansi dibuat untuk menyeragamkan pelaporan keuangan. Aturan akuntansi dibuat untuk mengatasi masalah keagenan, apabila tidak dilaksanakan akan berpengaruh terhadap kredibilitas informasi pada laporan keuangan tidak akan tercapai. Agar menghasilkan informasi yang berkualitas, penyajian laporan keuangan harus sesuai dengan prosedur dan prinsip akuntansi. Penerapan prinsip akuntansi menurut IAI meliputi tanggungjawab penerapan, kepentingan publik, integritas, objektivitas, kehati-hatian, kerahasiaan, konsistensi, dan standar teknis. Sedangkan untuk laporan keuangan menurut SAP harus memiliki laporan keuangan yang handal, relevan, dapat dibandingkan, serta dapat dipahami.

**a. Relevan**

Laporan keuangan bersifat relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mengevaluasi peristiwa masa lalu., masa kini, dan memprediksi masa depan, Informasi dapat dikatakan relevan apabila apabila memenuhi syarat: memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*), memiliki manfaat prediktif (*predictive value*), tepat waktu, dan lengkap.

**b. Handal**

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, disajikan berdasarkan fakta, serta dapat diverifikasi. Informasi yang relevan namun tidak dapat diandalkan akan berpotensi menyesatkan dan merugikan informasi yang andal memenuhi karakteristik : disajikan secara jujur, dapat diversifikasi, dan netral.

**c. Dapat Dibandingkan**

Pemakai laporan keuangan harus dapat membandingkan laporan keuangan organisasi antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi keuangan. Pemakai harus dapat mebandingkan laporan keuangan antar organisasi untuk mkengevaluasi posisi keuangan secara relatif. Oleh sebab itu, pengukuran dan penyajian dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang serupa dilakukan secara konsisten.

**d. Dapat dipahami**

Kualitas penting informasi yang ditampilkan dalam, laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dipahami oleh pemakai. Dalam hal ini, pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketentuan yang wajar. Namun demikian, informasi kompleks yang seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan tidak dapat dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut dapat dipahami oleh pemakai tertentu.

**7. Penegakan Hukum**

Penegakan hukum adalah upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Chandra dan Ikhsan, 2015). Penegakan hukum di pemerintah daerah harus dilaksanakan dan dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam rangka memajukan daerah tersebut termasuk dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Penegakkan hukum terkait dengan peraturan dan undang-undang yang mampu mengendalikan pemerintah daerah agar pengelolaan APBD berjalan secara transparan sesuai dengan kepentingan publik. Jika pengelolaan tersebut tidak dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku

maka memungkinkan terjadi kecurangan dari orang yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan tersebut.

## **8. Budaya Etis**

Budaya etis di lingkungan kerja menyangkut penerapan etika manajemen. Etika manajemen diukur seorang pegawai dalam melakukan tindakan, karena individu lebih sering mengikuti tindakan yang dilakukan oleh sebagian besar orang yang ada dalam suatu organisasi/perusahaan (Adi dkk, 2016). Menurut Cushway dan Lodge (GE : 2000) dalam Arum, dkk (2016), budaya organisasi merupakan sistem nilai organisasi dan akan mempengaruhi cara pekerjaan dilakukan dan cara para karyawan berperilaku. Dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan budaya organisasi dalam penelitian ini adalah sistem nilai organisasi yang dianut oleh anggota organisasi, yang kemudian mempengaruhi cara bekerja dan berperilaku dari para anggota organisasi.

Beberapa pengertian mengenai budaya etis tersebut memberikan makna bahwa budaya etis merupakan suatu kondisi dimana karyawan dihadapkan pada komitmen tujuan organisasi. Perilaku karyawan dibatasi dengan peraturan-peraturan yang ada, sehingga menghasilkan perilaku yang berorientasi pada tujuan organisasi. Hal ini tentunya pihak organisasi juga harus memberikan dukungan sehingga terjadi keseimbangan antara tuntutan dengan dukungan yang diberikan oleh organisasi.

## B. Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul	Hasil
1	Najanigrum, (2013)	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi <i>fraud</i> : Pegawai Dinas Provinsi DIY	Efektivitas pengendalian internal, moralitas individu, komitmen organisasi, asimetri informasi, penegakan, keadilan distributif, dan keadilan prosedural berpengaruh negatif terhadap kecenderungan ( <i>fraud</i> ). Sedangkan, asimetri informasi berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Budaya etis tidak berpengaruh terhadap <i>fraud</i> .
2	Prawira,dkk (2014)	Efektivitas Pengendalian Internal, moralitas individu, Asimetri Informasi terhadap Kecenderungan Kecurangan ( <i>Fraud</i> ) Akuntansi ( Studi Empiris Pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Buleleng )	Asimetri informasi, efektivitas pengendalian internal, moralitas individu berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan kecurangan ( <i>fraud</i> ) akuntansi. Sedangkan informasi positif berpengaruh terhadap kecenderungan akuntansi ( <i>fraud</i> ).

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**  
**(Lanjutan)**

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul	Hasil
3	Saputra,dkk (2015)	Pengaruh Pengendalian Intern Kas , Implementasi Good Governance Dan Moralitas Individu Terhadap Kecurangan ( <i>Fraud</i> ) ( Studi Empiris Pada LPD Di Kabupaten Buleleng Bagian Timur )	Pengendalian intern kas, <i>good governance</i> , moralitas individu berpengaruh negatif terhadap <i>fraud</i> .
4	Chandradan Ikhsan, (2015)	Determinan Terjadinya Kecenderungan Kecurangan Akuntansi ( <i>Fraud</i> ) Pada Dinas Pemerintah Se Kabupaten Grobogan	Sistem pengendalian internal, perilaku tidak etis, dan kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan akuntansi
5	Adinda dan Ikhsan, (2015)	Faktor yang Mempengaruhi Kecurangan ( <i>fraud</i> ) di Sektor Pemerintahan Kabupaten Klaten	Kefektivan pengendalian internal, kultur organisasi, kesesuaian kompensasi, penegakan peraturan, keadilan distributif, keadilan prosedural, dan komitmen organisasi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan <i>fraud</i>
6	Puspasari dan Suwardi, (2016)	The Effect of Individual Morality and Internal Control on the Propensity To Commit Fraud	Efektivitas pengendalian internal dan moralitas individu berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan ( <i>fraud</i> )

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**  
**(Lanjutan)**

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul	Hasil
7	Susandra dan Hartina, (2017)	Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan fraud pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Kota Bogor	Penegakan hukum, keefektifan pengendalian internal, asimetri informasi, keadilan distributif, keadilan komitmen organisasi, dan budaya organisasi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan ( <i>fraud</i> )
8	Adi dkk., (2016)	Analisis Faktor-Faktor Penentu Kecurangan ( <i>Fraud</i> ) (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan)	Penegakan hukum, efektivitas pengendalian internal, kesesuaian kompensasi, keadilan prosedural, budaya etis organisasi, komitmen organisasi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan.
9	Wulandari.,dkk, (2017)	Persepsi Pegawai Bagian Keuangan Dinas Kabupaten Sragen Terhadap Penyebab Terjadinya <i>Fraud</i> Di Sektor Pemerintahan	Efektivitas pengendalian internal, Kesesuaian kompensasi dan perilaku tidak etis berpengaruh negatif terhadap <i>fraud</i>
10	Putu, (2017)	Pengaruh Efektivitas Pengendalian Internal , Ketaatan Aturan Akuntansi , Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan ( <i>Fraud</i> ) Akuntansi ( Studi Empiris Pada Lembaga Perkreditan Desa Di Kabupaten Buleleng )	Keefektifan pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi, dan komitmen organisasi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**  
**(Lanjutan)**

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul	Hasil
11	Prekanida Farizqa Shintadevi, (2015)	Pengaruh Pengendalian Internal Dan Budaya Etis Organisasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan ( Fraud ) Pada Koperasi Simpan Pinjam	Pengaruh pengendalian internal berpengaruh positif terhadap fraud budaya etis organisasi berpengaruh negatif terhadap fraud
12	Junia, (2016)	Pengaruh Moralitas Aparat, Kesesuaian Kompensasi, Dan Ketaatan Aturan Akuntansi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar)	Kesesuaian kompensasi dan ketaatan aturan akuntansi tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi sedangkan pengaruh moralitas aparat, tidak berpengaruh terhadap fraud
13	Bambang, (2016)	Pengaruh Moralitas Aparat, Penegakan Hukum, dan Kesesuaian Kompensasi (Studi Empiris di BUMD Jepara)	Penegakan hukum tidak berpengaruh terhadap fraud. Sedangkan, moralitas aparat dan ketaatan aturan akuntansi berpengaruh negatif terhadap fraud.
14	Downida dan Riharjo, (2017)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Pada SKPD Kota Kediri	Pengendalian internal, ketaatan pada aturan akuntansi, dan asimetri informasi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi ( <i>fraud</i> )

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**  
**(Lanjutan)**

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul	Hasil
15	Permana, (2017)	Determinant Of Fraud In Government Agency : Empirical Study At The Finance And Development Supervisory Agency ( BPKP) Of Jakarta Representative Office	Efektivitas pengendalian internal dan ketaatan pada aturan akuntansi Berpengaruh negatif terhadap kecenderungan <i>fraud</i>
16	Wijaya <i>dkk</i> , (2017)	Pengaruh Efektivitas Pengendalian Internal, Kesesuaian Kompensasi, Moralitas Individu, dan Whistleblowing Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Pada LPD di Kecamatan Gerokgak	Pengaruh Efektivitas Pengendalian Internal, Kesesuaian Kompensasi, Moralitas Individu, dan Whistleblowing. Berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan Akuntansi

*Sumber : Data diolah berdasarkan penelitian terdahulu (2017)*

### C. Perumusan Hipotesis

#### 1. Pengaruh Efektivitas Pengendalian Internal terhadap *Fraud*

Efektifitas pengendalian internal adalah proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai terkait dengan pencapaian tujuan manajemen (Saputra *dkk.*, 2015). Menurut Wulandari *dkk.*, (2017) Efektifitas pengendalian internal dalam penelitiannya di persepsi pegawai dinas mengenai efektifitas adalah penerapan sistem prosedur yang dijalankan oleh atasan dan bawahan entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan tertentu dalam

suatu instansi. Tujuan dari efektivitas pengendalian internal adalah memberikan keyakinan memadai mengenai pencapaian tujuan yang tercermin dalam keandalan laporan keuangan, efisiensi dan efektivitas program dan kegiatan, serta dipatuhinya peraturan perundang-undangan. Pengendalian internal yang dilakukan secara efektif mampu memberikan solusi terhadap keterbatasan dalam mengurangi kecenderungan *fraud*. Terdapat lima unsur pokok pengendalian internal yaitu lingkungan pengendalian, penetapan risiko, aktivitas pengendalian, informasi, komunikasi akuntansi, dan pemantauan. Pengendalian internal dilakukan agar kegiatan dan kelancaran operasional instansi dapat dipertahankan, serta jaminan terhadap aset kas milik instansi untuk menghindari penyelewengan atau penyalahgunaan aset kas oleh para pegawainya. Keefektifan pengendalian internal akan berpengaruh terhadap kelancaran operasional sehari-hari.

Kecenderungan kecurangan akuntansi dipengaruhi oleh ada atau tidaknya peluang atau kesempatan. Peluang yang besar membuat kecenderungan kecurangan akuntansi lebih sering terjadi, dan sebaliknya. Keefektifan pengendalian internal yang baik dengan tercapainya visi dan misi instansi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 tahun 2008 meminimalisir tindak kecurangan (*fraud*). Hal ini tentunya tercermin dalam kegiatan-kegiatan operasional suatu entitas dan kebijakan yang ada. Kesimpulannya adalah keefektifan pengendalian internal yang

tinggi maka akan meminimalisir tindak kecurangan yang ada dalam suatu instansi.

Permana, (2017) menyatakan bahwa keefektivan pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*). Hasil ini juga konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Downida dan Riharjo, (2017) yang menemukan bahwa keefektivan pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap tingkat kecenderungan kecurangan akuntansi (*fraud*) pada SKPD Kota Kediri. Hal ini mengisyaratkan bahwasanya sistem pengendalian yang dijalankan dengan baik maka peluang terjadinya *fraud* akan semakin kecil. Chandra dan Ikhsan, (2015) menemukan bahwasanya sistem pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap *fraud*. Berdasarkan teori yang disajikan serta hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis yang dirumuskan adalah

**H1. Efektivitas pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap *fraud*.**

## **2. Pengaruh Ketaatan Aturan Akuntansi terhadap *Fraud***

Ketaatan aturan akuntansi adalah standar akuntansi dibuat untuk menyeragamkan pelaporan keuangan (Ikatan Akuntani Indonesia, 2007). Aturan akuntansi dibuat untuk mengatasi masalah keagenan, laporan keuangan apabila tidak dilaksanakan akan berpengaruh terhadap kredibilitas informasi laporan keuangan. Laporan keuangan yang dibuat harus berkualitas, penyajian laporan keuangan harus sesuai dengan prosedur dan prinsip akuntansi. Penerapan prinsip akuntansi menurut IAI

meliputi tanggungjawab penerapan, kepentingan publik, integritas, dan objektivitas.

Ketaatan aturan akuntansi merupakan panduan dalam melaksanakan terhadap pelaporan dan penyusunan laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan harus mengandung prinsip-prinsip akuntansi. Sehingga, menghasilkan laporan keuangan yang relevan, handal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Apabila laporan keuangan tersebut mampu menerapkan prinsip-prinsip tersebut maka dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan tersebut pencatatnya secara wajar. Jika suatu entitas mampu menerapkan ketaatan terhadap aturan akuntansi maka akan meminimalisir kecenderungan *fraud* yang ada didalamnya. Namun, jika ketaatan aturan akuntansi dapat tidak dapat dijalankan dengan baik maka akan mengakibatkan kecenderungan *fraud*. Dalam teori penalaran moral pada tahap konvensional, suatu manajemen yang berorientasi pada peraturan yang berlaku, sehingga ketaatan aturan akuntansi dapat membentuk moralitas manajemen yang tinggi dan dapat menurunkan kecenderungan kecurangan akuntansi yang dilakukan oleh manajemen.

Penelitian Putu dkk, (2017) menunjukkan bahwa Ketaatan aturan akuntansi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan *fraud*. Hal ini juga konsisten dengan penelitian yang dilakukan Dwi dkk., (2017) di KSP Kecamatan Buleleng. Downida dan Riharjo, (2017) mengatakan bahwa ketaatan aturan akuntansi secara parsial berpengaruh negatif terhadap

kecenderungan kecurangan (*fraud*) saat meneliti SKPD di Kota Kediri. Hal ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Permana, (2017) dimana ketaatan aturan akuntansi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*). Semakin tinggi ketaatan akuntansi instansi maka semakin rendah kecenderungan *fraud* disuatu instansi. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut

**H2. Ketaatan aturan akuntansi berpengaruh negatif terhadap *fraud*.**

### **3. Pengaruh Moralitas Individu terhadap *Fraud***

Moralitas Individu adalah moral yang sesuai dengan aturan yang mengatur hukum sosial atau adat atau perilaku (Saputra dkk., 2015). Moralitas manusia dalam menjalankan perilakunya terbagi kedalam beberapa tingkatan. Moralitas individu yang tinggi maka akan meminimalisir kecurangan akuntansi yang berada ditingkat daerah maupun pusat. Hal ini dorong oleh kepatuhan individu terhadap aturan yang dimiliki oleh suatu organisasi.

Teori perkembangan moral yang dikemukakan oleh Kohlberg (1971) mempunyai pandangan bahwa penalaran moral merupakan landasan perilaku etis. Terdapat tiga tahapan dalam perkembangan moral seseorang. Tahapan pertama (*pre-conventional*) yaitu tahapan yang paling rendah, individu cenderung bertindak karena tunduk dan takut pada hukum. Serta pada level ini individu menanggapi bahwa kepentingan pribadi lebih penting. Hubungan dengan teori perkembangan moral yang

dikemukakan oleh Kohlberg (1971) maka individu dengan tingkat penalaran yang tinggi akan mematuhi peraturan yang berlaku dalam suatu organisasi untuk menciptakan suasana yang kondusif. Kepatuhan menjadi salah satu indikator untuk memenuhi apakah seorang memiliki penalaran moral yang tinggi. Hal tersebut akan membantu dalam penyelesaian dilema etika yang dihadapi.

Wijaya *dkk*, (2017) menyatakan bahwasanya moralitas individu berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*). Puspasari dan Suwardi, (2016) dalam penelitiannya yang dilakukan di Pemerintahan daerah menemukan bahwasanya moralitas individu berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*). Hal ini mengisyaratkan bahwasanya semakin tinggi level penalaran moral seseorang maka kemungkinan melakukan tindakan kecurangan semakin kecil. Hal ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Saputra, *dkk* (2015) LPD di kabupaten Buleleng bagian timur yang menyatakan bahwasanya moralitas individu berhubungan negatif dengan kecenderungan kecurangan (*fraud*). Berdasarkan uraian tersebut maka dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut

**H3. Moralitas individu berpengaruh negatif terhadap *fraud*.**

#### **4. Pengaruh Kesesuaian Kompensasi terhadap *Fraud***

Kesesuaian kompensasi merupakan persepsi karyawan tentang sesuatu yang dipertimbangkan sebagai suatu yang sebanding. Kompensasi seperti hadiah yang bersifat uang merupakan kompensasi yang diberikan

pegawai sebagai penghargaan dari pelayanan mereka (Wulandari,dkk 2017). Pemberian kompensasi sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai diharapkan membuat pegawai merasa tercukupi sehingga akan meningkatkan kinerja pegawai dan mengurangi tindakan kecurangan (*fraud*).

Kesesuaian kompensasi sesuai dengan tanggung jawab yang telah dilaksanakan mampu memberikan komitmen untuk individu dalam suatu instansi. Komitmen dalam individu tersebut dapat tercermin dengan kinerja individu tersebut. Menurut teori *fraud triangle* faktor alasan pembenaran dari organisasi mampu memproksikan kesesuaian kompensasi. Kompensasi yang tinggi mampu membuat individu melakukan tindakan-tindakan yang beretika sehingga meminimalisir terjadinya *fraud*.

Wijaya dkk, (2017) mengatakan kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) di LPD Kecamatan Gerogak. Hasil ini juga konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Wulandari dkk, (2017) dalam penelitiannya mengenai kecenderungan kecurangan akuntansi dengan persepsi Dinas Keuangan Kabupaten Sragen. Chandra dan Ikhsan, (2015) mengenai kecenderungan *fraud* di Dinas Se Grobogan juga meneliti keterkaitan kesesuaian kompensasi terhadap kecenderungan kecurangan. Hal ini mengisyaratkan bahwa kompensasi yang diberikan karyawan sesuai tanggungjawabnya maka akan mengurangi peluang terjadinya *fraud*.

Berdasarkan teori yang disajikan serta hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis yang dirumuskan adalah

#### **H4. Kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif terhadap *fraud***

### **5. Pengaruh Penegakan Hukum terhadap *Fraud***

Penegakan peraturan adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Dwi dkk., 2017). Penegakan hukum merupakan upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Penegakan hukum merupakan suatu tindakan nyata oleh subjek hukum terhadap hukum yang berlaku disuatu negara. Kecurangan dapat disebabkan adanya ketidaksadaran pentingnya menaati hukum maupun kurang ketegasan dalam penegakan hukum. Kesadaran untuk mematuhi hukum akan timbul apabila penegakan hukum dapat berjalan semestinya. Menurut Teori *fraud triangle* faktor tekanan dari organisasi mampu memproksikan penegakan hukum dari tekanan organisasinya. Penegakan hukum yang dijalankan dalam organisasi maka dapat mendorong seseorang untuk melakukan tindakan-tindakan yang beretika sehingga *fraud* dapat diminimalisir.

Penegakan hukum identik dengan peraturan pemerintah dapat menjalankan suatu instansi pemerintahan. Peraturan hukum instansi pemerintah mampu menghasilkan pengelolaan Anggaran Pendapatan

Belanja Daerah (APBD) yang transparan. Hal ini tentunya mengisyaratkan pengelolaan dan penggunaan APBD sesuai dengan kepentingan publik. Penegakan hukum dapat berjalan jika antara atasan dan bawahan melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut sesuai visi dan misi instansi. Penegakan hukum suatu instansi dapat meminimalisir tindakan terjadinya kecurangan (*fraud*). Hal ini berlaku jika penegakan hukum ditaati oleh instansi pemerintah dengan baik maka dapat meminimalisir kecenderungan kecurangan akuntansi. Sedangkan jika penegakan hukum disuatu instansi tidak dilaksanakan dengan baik maka akan mengurangi tindak kecenderungan kecurangan akuntansi.

Adinda dan Ikhsan, (2015) studi empiris di sektor pemerintahan Kabupaten Klaten mengatakan bahwasanya penegakan hukum berpengaruh negatif terhadap kecenderungan *fraud*. Hal ini juga konsisten dengan penelitian yang dilakukan (Susandra dan Hartina, 2017) dengan studi empiris di SKPD Kota Bogor. Semakin tinggi penegakan hukum disuatu instansi maka semakin rendah kecenderungan *fraud* disuatu instansi. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut

**H5. Penegakan berpengaruh negatif terhadap *fraud***

## **6. Pengaruh Budaya Etis terhadap *Fraud***

Budaya etis di lingkungan kerja menyangkut penerapan etika manajemen Etika manajemen diukur seorang pegawai dalam melakukan tindakan, karena individu lebih sering mengikuti tindakan yang dilakukan

oleh sebagian besar orang yang ada dalam suatu organisasi/perusahaan (Adi dkk, 2016). Budaya etis suatu organisasi merupakan identitas suatu organisasi, komitmen organisasi, dan loyalitas suatu sistem sosial. Budaya etis suatu instansi juga dapat mengukur keberhasilan organisasi, menginformasikan terkait penggunaan dan kepentingan sumber daya organisasi, menciptakan hubungan saling ketergantungan antara organisasi dan anggota, serta merumuskan berbagai cara dalam pengawasan tingkah laku dalam keabsahan organisasi dengan menetapkan posisi kekuasaan serta cara menggunakannya. Teori *fraud triangle* faktor alasan pembenaran (*Rasionalitation*) dari organisasi mampu memproksikan kesesuaian kompensasi. Kompensasi yang tinggi mampu membuat individu melakukan tindakan-tindakan yang beretika. Budaya etis organisasi akan meningkatkan loyalitas sehingga meminimalisir terjadinya *fraud*.

Budaya etis suatu organisasi menandakan identitas suatu instansi. Identitas tersebut ditandai dengan adanya etika-etika yang berlaku disuatu instansi. Secara umum, budaya etis suatu instansi mampu meningkatkan komitmen individu yang ada didalamnya. Hal ini mengisyaratkan bahwa budaya etis suatu instansi mampu meminimalisir tindak kecurangan (*fraud*). Sebaliknya budaya etis yang buruk mampu terjadinya *fraud* diinstansi.

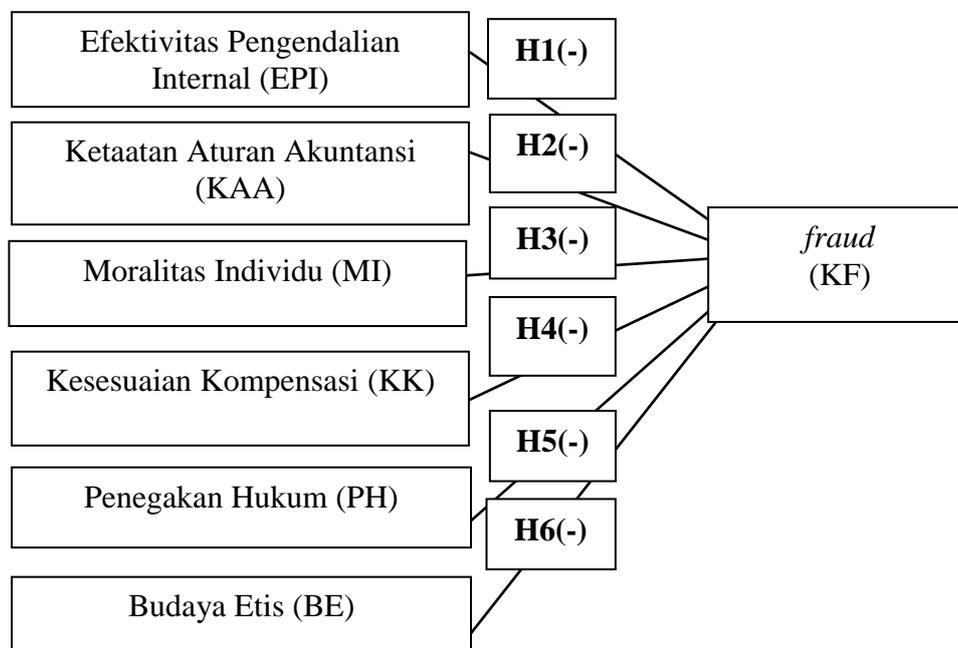
Susandra dan Hartina, (2017) menyatakan bahwa budaya etis berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) di Satuan

Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Bogor. Hasil ini juga konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Adi dkk., (2016) di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pekalongan. Adinda dan Ikhsan, (2015) mengatakan bahwa budaya organisasi juga berpengaruh negatif terhadap tingkat kecenderungan kecurangan akuntansi (*fraud*) pada Sektor Pemerintahan Kabupaten Klaten.

Hal ini mengisyaratkan bahwa budaya organisasi yang dijalankan dengan baik maka peluang terjadinya *fraud* akan semakin kecil. Berdasarkan teori yang disajikan serta hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis yang dirumuskan adalah

**H6. Budaya organisasi berpengaruh negatif terhadap *fraud***

#### D. Model Penelitian



**Gambar 2.1**  
**Model Penelitian**

## **BAB III**

### **METODA PENELITIAN**

#### **A. Metoda Akuntansi**

##### **1. Sampel dan Populasi**

Populasi adalah sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu (sugiyono, 2012). Populasi penelitian ini meliputi perangkat desa dan anggota pengelola dana desa di desa se Kecamatan Mertoyudan dengan jumlah 12 desa. Sampel adalah bagian dari populasi yang akan dijadikan objek dalam melakukan penelitian dan pengujian data (sugiyono, 2013) dengan jumlah responden sebanyak 34 responden. Teknik pengambilan sample dengan menggunakan *purposive sampling*. Adapun kriteria yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah

- a. Sampel dalam penelitian ini adalah kades, sekretaris desa, dan kaur keuangan.
- b. Bagian keuangan yang bekerja selama lebih 1 tahun. Kriteria ini diharapkan responden mampu mengetahui tentang kecamatan secara keseluruhan.

#### **B. Data Penelitian**

##### **a. Jenis dan sumber data**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, yaitu penelitian dengan memperoleh data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang

diangkakan (Sugiyono, 2012). Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data primer. Data primer yaitu data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli dan data dikumpulkan secara khusus untuk menjawab pertanyaan penelitian yang sesuai dengan keinginan peneliti. Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok tentang variabel-variabel yang berkaitan dengan penelitian (Sugiyono, 2012).

**b. Teknik pengumpulan data**

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan teknik survey, yaitu dengan memberikan kuesioner yang langsung disebarkan dari sumber pertama baik dari individu atau perorangan seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuesioner tentang hal itu. Kuesioner yang telah diisi oleh responden, diseleksi terlebih dahulu agar kuesioner yang tidak lengkap pengisiannya tidak disertakan dalam analisis. Peneliti memilih cara demikian dengan pertimbangan bahwa metode survey langsung lebih efektif dan mengurangi risiko tidak kembalinya kuesioner yang telah disebar.

### C. Variabel penelitian dan Pengukuran Variabel

**Tabel 4.1**  
**Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel**

No	Variabel	Definisi	Pengukuran
<b>Variabel Independen :</b>			
1	Keefektivan Pengendalian Internal (KPI)	pengendalian intern adalah suatu proses dengan tujuan untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian, keandalan informasi, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, serta efektifitas dan efisiensi operasi oleh dewan komisaris dan manajemen, serta personel lainnya (Ikatan Akuntan Indonesia).	Indikatornya sistem informasi, evaluasi, dan lingkungan pengendalian. Mengacu pada Adelin, (2013) dalam Rahayuningsih, (2017) Instrumen 4 butir skala linkert 1-5.
2	Kesesuaian kompensasi (KK)	Kesesuaian kompensasi merupakan persepsi karyawan tentang sesuatu yang dipertimbangkan sebagai suatu yang sebanding. Kompensasi seperti hadiah yang bersifat uang merupakan kompensasi yang diberikan pegawai sebagai penghargaan dari pelayanan mereka (Wulandari, dkk 2017).	Indikatornya adalah gaji dan tunjangan. Mengacu pada Sumaryati, dkk (2013) dewi utawati (2017) Instrumen 3 butir skala linkert 1-5.
3	Moralitas Individu	Moralitas Individu adalah moral yang sesuai dengan aturan yang mengatur hukum sosial atau adat atau perilaku (Saputra dkk., 2015).	<i>Defining Issue Test</i>

**Tabel 4.1**  
**Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel**  
**(Lanjutan)**

No	Variabel	Definisi	Pengukuran
4	Budaya Etis (BE)	Budaya etis di lingkungan kerja menyangkut penerapan etika manajemen Etika manajemen diukur seorang pegawai dalam melakukan tindakan, karena individu lebih sering mengikuti tindakan yang dilakukan oleh sebagian besar orang yang ada dalam suatu organisasi atau perusahaan (Adi dkk, 2016).	Tata tertib dan kerjasama tim yang ada dalam suatu instansi. Mengacu pada Najanigrum, (2013) Instrumen 5 butir skala linkert 1-5.
5	Ketaatan Aturan Akuntansi (AA)	Standar akuntansi dibuat untuk menyeragamkan pelaporan keuangan. Ikatan Akuntan Indonesia (2007)	Indikatornya adalah persyaratan pengungkapan, Informasi yang bermanfaat, objektif, dan memenuhi konsep konsistensi penyajian. Mengacu Adelin, (2013) dalam Rahayuningsih, (2017) Instrumen 5 butir skala linkert 1-5.
6	Penegakan Hukum (PH)	Pendapatnya mengenai penegakan hukum ( <i>law enforcement</i> ) adalah pelaksanaan hukum secara konkrit dalam kehidupan masyarakat. Adinda dan Ikhsan, (2015)	Instrumen yang digunakan untuk mengukur penegakan peraturan dikembangkan dari penelitian Adinda dan Ikhsan, (2015). dengan indikator: Peraturan perundang-undangan Instrumen 3 butir skala linkert 1-5.

**Tabel 4.1**  
**Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel**  
**(Lanjutan)**

No	Variabel	Definisi	Pengukuran
<b>Variabel Dependen :</b>			
7	<i>Fraud</i> (F)	<i>Fraud</i> merupakan representasi tentang fakta material yang palsu dan sengaja atau ceroboh sehingga diyakini serta ditindaklanjuti oleh korban Wulandari, dkk (2017).	Indikatornya adalah kecenderungan untuk melakukan manipulasi catatan akuntansi, kecenderungan untuk menghilangkan informasi yang signifikan, dan kecenderungan untuk menyajikan laporan keuangan yang salah. Mengacu pada Rahayuningsih, (2017). Instrumen 5 butir skala linkert 1-5.

Sumber : Diolah dari data primer,2018

#### D. Alat Analisis

##### 1. Statistik Diskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata, standar deviasai, varian, *maksimum*, *minimum*, *sum*, *range*, *kurtosiws*, dan *skewness* (Ghozali, 2016:19). Kurtosis dan *skewness* merupakan ukuran untuk melihat apakah data terdistribusi normal apakah tidak. *Skewness* mengukur kemencengan dari data dan kurtosis mengukur puncak dari distribusi data. Statistik deskriptif memberikan gambaran terperinci mengenai profil responden meliputi jenis kelamin, tingkat pendidikan, jabatan, dan lamanya kerja.

## 2. Uji Kualitas Data

### a. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Pengujian validitas dilakukan dengan *confirmatory factor analysis* (CFA). CFA digunakan untuk menguji apakah indikator-indikator yang digunakan dapat mengkonfirmasi sebuah variabel. Hal ini tentunya dihubungkan dengan indikator yang mampu menjelaskan variabelnya. Analisis faktor konfirmatori mengelompokkan masing-masing indikator kedalam beberapa faktor apabila yang digunakan indikator konstruk, kemudian dengan melihat dari nilai faktor *loading*-nya. Syarat yang harus dipenuhi, pertama, *loading factor* harus signifikan. Oleh karena *loading factor* yang signifikan bisa jadi masih rendah nilainya, maka *standardized loading estimated* harus sama dengan 0.05 atau lebih, dan idealnya harus 0.07 (Ghozali, 2016). Jadi *item* pertanyaan yang memiliki *loading factor* > 0,50 dapat dikatakan valid

### b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner merupakan kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel jika jawaban dari waktu ke waktu dikatakan konsisten. Pengujian secara reabilitas suatu kuesioner untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran

tetap konsisten apabila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama. Uji reabilitas dalam penelitian ini menggunakan koefisien *Cronbach Alpha* ( $\alpha$ ), walaupun kenyataannya *Cronbach Alpha* memberikan reliabilitas yang lebih rendah (*under estimate*) dibandingkan dengan *construct reliability*. *Construct reliability* 0.70 atau lebih menunjukkan reliabilitas yang baik, sedangkan reliabilitas 0.60–0.70 masih dapat diterima dengan syarat validitas indikator dalam model baik (Ghozali, 2016).

### c. Regresi Linear Berganda

Regresi berganda adalah suatu teknik statistik yang dapat digunakan untuk menganalisis hubungan antara suatu variabel dependen *fraud* dan beberapa variabel independen (efektivitas Pengendalian internal, kesesuaian kompensasi, budaya etis, Ketaatan aturan akuntansi, moralitas individu, dan penegakan hukum). Untuk itu diformulasikan model regresi berganda sebagai berikut:

$$F = a + \beta_1 \text{EPI} + \beta_2 \text{KAA} + \beta_3 \text{MI} + \beta_4 \text{KK} + \beta_5 \text{PH} + \beta_6 \text{BE} + e$$

#### Keterangan :

F	= <i>Fraud</i>
a	= Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5, \beta_6$	= Koefisien regresi
EPI	= Efektivitas Pengendalian Internal
KK	= Kesesuaian kompensasi
BE	= Budaya Etis
KAA	= Ketaatan Aturan Akuntansi
PH	= Penegakan hukum
e	= <i>Error</i>

## E. Uji Hipotesis

### 1. Uji $R^2$

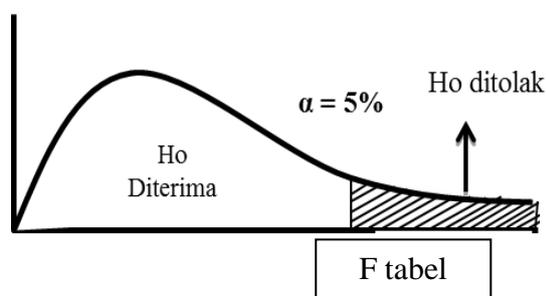
Koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model (Moralitas individu, pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi, kesesuaian kompensasi, budaya etis, dan penegakan hukum) dalam menerangkan variasi variabel dependen (kecenderungan kecurangan akuntansi). Nilai koefisien determinasi berada diantara nol (0) dan satu (1). Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Besarnya koefisien dari nol sampai satu, semakin mendekati nol koefisien determinasi semakin kecil pengaruhnya terhadap variabel bebas, sebaliknya mendekati satu besarnya koefisien determinasi semakin besar pengaruhnya terhadap variabel bebas. (Ghozali, 2016:97). Secara umum koefisien determinasi untuk data silang (*crosssection*) relatif rendah karena adanya variasi yang besar antara masing-masing pengamatan, sedangkan untuk data runtun waktu (*time series*) biasanya mempunyai nilai koefisien determinasi yang tinggi.

### 2. Uji F

Menurut Ghozali (2016:97) Uji F digunakan untuk mengukur ketepatan fungsi regresi dalam menaksirkan nilai aktual (*goodness of fit*). Uji F berfungsi untuk mengetahui apakah model yang digunakan *fit* ataupun tidak *fit*. Penentuan kriteria berdasarkan pada perbandingan antara F hitung dan f tabel. Tingkat signifikansi pada penelitian ini adalah sebesar

5% dengan derajat pembilang ( $df_1$ ) = k dan derajat kebebasan penyebut ( $df_2$ ) = n-k-1 dengan n adalah jumlah responden dan k adalah jumlah variabel indepen. Pengujian dilakukan dengan membandingkan kriteria:

- Jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$ , atau  $P\ value < \alpha = 0,05$  maka model yang digunakan dalam penelitian bagus (*fit*).
- Jika  $F_{hitung} < F_{tabel}$ , atau  $P\ value > \alpha = 0,05$  maka model yang digunakan dalam penelitian tidak bagus (*tidak fit*).



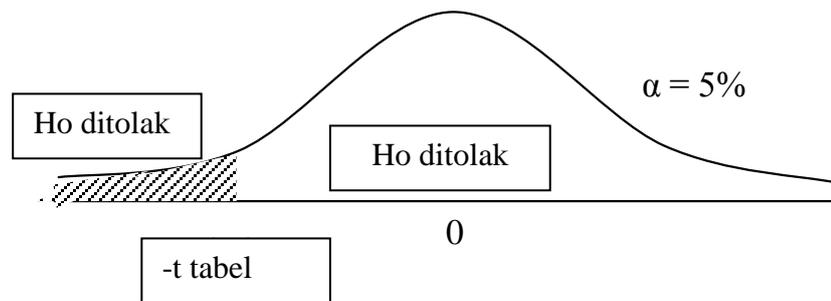
Gambar 3.1  
Uji F

### 3. Uji t

Uji t digunakan untuk menunjukkan kemampuan variabel independen dan menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2016:98). Uji t dilakukan berdasarkan perbandingan nilai t hitung masing-masing koefisien regresi dengan t tabel (nilai kritis) sesuai dengan tingkat signifikansi 5%. Menentukan n nilai t tabel menggunakan derajat kebebasan  $df = n-1$  dimana n menunjukkan banyaknya responden. Pengujian dilakukan dengan membandingkan kriteria:

- Ho ditolak jika  $-t\ hitung < -t\ tabel$  atau  $p\ value < \alpha = 0,05$ , artinya terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.

- b.  $H_0$  diterima jika  $-t_{\text{hitung}} > -t_{\text{tabel}}$  atau  $p \text{ value} > \alpha = 0,05$ , artinya tidak terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.



Gambar 3.2  
Penerimaan Uji t

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **A. Kesimpulan**

Penelitian ini untuk menguji secara empiris pengaruh keefektivan pengendalian internal, budaya etis, moralitas individu, ketaatan aturan akuntansi, kesesuaian kompensasi, dan penegakan hukum terhadap *fraud* pada desa se Mertoyudan. Sampel pada penelitian ini adalah 34 perangkat desa yang meliputi kepala desa, sekdes, dan kaur keuangan.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan (1) hasil *Adjusted R Square* menunjukkan bahwa sebesar 49,30 % dipengaruhi variabel efektivitas pengendalian internal, budaya etis, moralitas individu, ketaatan aturan akuntansi, kesesuaian kompensasi, dan penegakan hukum dan sisanya 51,70% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti atau diluar model regresi penelitian ini. (2) model penelitian yang digunakan pada penelitian ini

sudah bagus (*fit*) untuk diuji. (3) hasil uji t menunjukkan bahwa ketaatan aturan akuntansi internal berpengaruh positif terhadap kecurangan (*fraud*). Sementara itu, efektivitas pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap *fraud* serta budaya etis, moralitas individu, kesesuaian kompensasi, dan penegakan hukum tidak berpengaruh terhadap *fraud*.

## **B. Keterbatasan Penelitian**

1. Pada penelitian ini, kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen masih terbatas.
2. Penelitian ini hanya meneliti efektivitas pengendalian internal, budaya etis, moralitas individu, ketaatan aturan akuntansi, kesesuaian kompensasi, dan penegakan hukum sehingga masih banyak variabel yang diteliti.
3. Data yang dianalisis dalam penelitian ini dikumpulkan dengan metode kuesioner, yang mengandung kelemahan yaitu kemungkinan tidak tercerminkan keadaan yang sesungguhnya. Hal ini dikarenakan dalam mengisi kuesioner, masih belum valid, sehingga menimbulkan bias.

## **C. Saran**

1. Penelitian selanjutnya dapat memperluas jumlah sampel dengan cara menambahkan sampel desa-desa lainnya, sehingga mudah untuk menggeneralisasikan hasil penelitian.
2. Penelitian selanjutnya perlu menambahkan variabel lain yang dapat mempengaruhi kecurangan (*fraud*) akuntansi di pemerintah daerah, misalnya keadilan organisasi dan gaya kepemimpinan.

3. Penelitian selanjutnya dapat melakukan *pilot test* sebelum kuesioner disebar kepada sampel yang sesungguhnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adelin, V., & Fauzihardani, E. (2013). Pengaruh Pengendalian Internal, Ketaatan Aturan Akuntansi, Dan Kecendrungan Kecurangan Terhadap Perilaku Tidak Etis (Studi Empiris pada BUMN di Kota Padang). *Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*, 1(September), 259–276.
- Adi, M. R. K., Ardiyani, K., & Ardianingsih, A. (2016). Analisis Faktor-Faktor Penentu Kecurangan ( Fraud ) (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan). *Jurnal Litbang Kota Pekalongan*, 10, 1–10.
- Adinda, Y. M., & Ikhsan, S. (2015). Faktor yang Mempengaruhi Kecurangan (fraud) di Sektor Pemerintahan Kabupaten Klaten, 4(3), 1–9.
- Association of Certified Fraud Examiner (ACFE), 2010. Report to the Nation on Occupational Fraud and Abuse, Global Fraud Study, ACFE, New York.
- Bambang, (2016). Pengaruh moralitas aparat, Penegakan hukum, dan Kesesuaian kompensasi (Studi Empiris Pada BUMD Jepara), *Jurnal Akuntansi*, 4, 1–12.
- BPS.go.id diakses 18 Agustus 2018
- Buckley, M. R., D. S. Wiese M. G. and Harvey, 1998. An Investigation into Dimensions of Unethical Behavior. *Journal of Education for Bussiness* 73 (5), pp: 284- 290.
- Chandra, D. P., & Ikhsan, S. (2015). Determinan Terjadinya Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Fraud) Pada Dinas Pemerintah Se Kabupaten Grobogan. *Jurnal Akuntansi*, 4(3), 1–9.
- Cressey, Donald. R., 1953. “Other people’s money, dalam: The Internal Auditor as Fraud Buster, Hillison, Willim. Et. Al. 1999”, *Managerial Auditing Journal* Dalnial, Hawariah, Amrizah Kamaluddin,
- Damayanti, A.P., Susilaningsih, Sumaryati, S. (2013). Pengaruh kompensasi dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan perusahaan air minum (PDAM) Surakarta. *JUPE UNS*, 2(1), 155–168.
- Downida, A. N., & Riharjo, I. B. (2017). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Pada SKPD Kota Kediri. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 6.

- Diskominfo Kabupaten Magelang. 2018. Web Pemerintah Kabupaten Magelang (online). <http://www.magelangkab.go.id>. Diakses 1 Mei 2018
- Dwi, M., Yadnya, K., Sinarwati, N. K., Yuniarta, G. A., & Ganesha, U. P. (2017). Pengaruh Moralitas Individu, Efektivitas Sistem Pengendalian Internal, dan Ketaatan Aturan Akuntansi Terhadap Kecenderungan Kecurangan ( Fraud ) ( Studi Kasus Pada KSP Kecamatan Buleleng ), 7.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Multivariate Dengan Program SPSS*. Jakarta: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Inspektorat.jatengprov.go.id
- Junia, N. (2016). Pengaruh Moralitas Aparat, Kesesuaian Kompensasi, Dan Ketaatan Aturan Akuntansi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar). *JOM Fekon*, 3.
- Ketut, N., Tri, A., Sujana, E., & Purnamawati, I. G. A. (2017). Akuntansi , Dan Efektivitas Pengendalian Internal. *E-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 8(1).
- Kohlberg, Lawrence.2017. Stage of Moral Development. Working paper (online). <http://info.psu.edu.sa>. Diakses 20 Mei 2017
- KPK.ac.id."Kasus Korupsi di Indonesia.2017
- Lestari, K. A., Purnamawati, I. G. A., & Herawati, N. T. (2015). Pengaruh Pengendalian Internal dan Budaya Etis Organisasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan ( Fraud ) Pada Koperasi Simpan Pinjam. *SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 3
- Luh, N., Ari, E., Adiputra, I. M. P., & Herawati, N. T. (2014). Pengendalian Internal Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Pada Satuan Kerja Perangkat, 2.
- Najahningrum, A. F. (2013). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi fraud: Pegawai Dinas Provinsi DIY, 2(3), 259–267.
- Nurul Azmi. (2017). Pengaruh Ketaatan Aturan Akuntansi, Kesesuaian Kompensasi Dan Asimetri Informasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Studi Pada BUMN di KotaPadang).
- Permana, B. A. (2017). Determinant Of Fraud In Government Agency : Empirical Study At The Finance And Development Supervisory Agency ( BPKP)

Of Jakarta Representative Office. *Asia Pasific Fraud Journal*, 2(1), 93–108.

Peraturan Daerah Nomer 15 tahun 2016

Prekanida Farizqa Shintadevi. (2015). Pengaruh Keefektifan Pengendalian Internal , Ketaatan Aturan Akuntansi Dan Kesesuaian Kompensasi Terhadap Etis Sebagai Variabel Intervening Prekanida Farizqa Shintadevi Alumni Program Studi Akuntansi Unvers. *Nominal, Iv*.

PPID.Magelangkab.go.id

Rahayuningsih, dwi. 2017. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kecenderungan Fraud pada Organisasi Perangkat Daerah (studi empiris pada kecamatan dan kelurahan di kabupaten magelang). *Skripsi*. Magelang : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Magelang.

Komisi Pemberantasan Korupsi. 2017. Penanganan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Instansi. <http://www.acch.kpk.go.id>. Diakses pada 1 Mei 2018

Kusumastuti, Nur Ratri.2012.”Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi dan Perilaku Tidak Etis sebagai Variabel Intervening”.Skripsi: Semarang: UNDIP

Liyanarachchi, Gregory and Chris Newdick. 2009. The Impact of Moral Reasoning and Retaliaton on Whistle-Blowing: New Zaeland Evidence. *Journal of Business Ethics (Online)*. Vol. 89; (37-57)

Prawira, I. M. D., Herawati, N. T., & Darmawan, N. A. S. (2014). Efektivitas Pengendalian Internal Terhadap Kecenderungan Kecurangan ( Fraud ) Akuntansi ( Studi Empiris Pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Buleleng ) E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha. *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1*, 2.

Puspasari, N., & Suwardi, E. (2016). The Effect of Individual Morality and Internal Control on the Propensity To Commit Fraud: *Journal of Indonesian Economy and Business*, 31(2), 208–219.

Putu, N., Widiutami, S., Luh, N., Erni, G., & Atmadja, A. T. (2017). Pengaruh Efektivitas Pengendalian Internal , Ketaatan Aturan Akuntansi , Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan ( Fraud ) Akuntansi ( Studi Empiris Pada Lembaga Perkreditan Desa Di Kabupaten Buleleng ). *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1*, 7(1).

- Ratnayani, P. A., Sujana, E., Ari, N., & Darmawan, S. (2014). Good Governance Terhadap Fraud ( Studi Empiris pada SKPD di Kabupaten Buleleng ). *E-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program SI*, 1(1).
- Spillane. 2003. *Triangle Fraud. Artikel Akuntansi*. Jakarta
- Saputra, K., Ari, N., Dharmawan, S., & Purnamawati, I. G. A. (2015). Pengaruh Pengendalian Intern Kas , Implementasi Good Governance Dan Moralitas Individu Terhadap Kecurangan ( Fraud ) ( Studi Empiris Pada LPD Di Kabupaten Buleleng Bagian Timur ). *E-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 3(1).
- Sari, N. L. P. P., Yuniarta, G. A., & Adiputra, I. M. P. (2015). Pengaruh Efektifitas Sistem Pengendalian Internal, Ketaatan Aturan Akuntansi, Persepsi Kesesuaian Kompensasi Dan Implementasi Good Governance Terhadap Kecenderungan Fraud (Studi Empiris Pada SKPD di Kabupaten Tabanan). *E-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan*, 3(1).
- Sentra Informasi dan Data untuk Anti Korupsi. 2017. *Korupsi di Kabupaten Magelang*. <http://infokorupsi.com>. Diakses 20 April 2018
- Sugiyono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Susandra, F., & Hartina, S. (2017). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan fraud p ada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Kota Bogor. *Jurnal Akunida ISSN 2442-3033*, 3, 35–55.
- Utawati, dwi. 2017. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Trunover Kinerja. *Skripsi*. Magelang : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Magelang.
- Wilopo. 2006. Analisis Faktor-faktor yang Bepengaruh Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi : Studi pada Perusahaan Publik dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia. *jurnal Riset Akuntansi Indonesia*. Vol.9.
- Wijaya, K. D. S., Sujana, 1Edy, Purnamawati, I. G. A., & Jurusan. (2017). Pengaruh Efektivitas Pengendalian Internal, Kesesuaian Kompensasi, Moralitas Individu, dan Whistleblowing Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Pada LPD di Kecamatan Gerokgak. *E-JournalSI Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program SI*, 1.

- Wulandari, A. F., Wijayanti, A., & Samrotun, Y. C. (2017). Persepsi Pegawai Bagian Keuangan Dinas Kabupaten Sragen Terhadap Faktor Penyebab Terjadinya Fraud Di Sektor Pemerintahan. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan Program Studi Akuntansi Fakultas Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia*, 765–771.
- Zelmiyanti, R., & Anita, L. (2015). Pengaruh Budaya Organisasi Dan Peran Auditor Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan Dengan Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Politeknik Caltex Riau*, 8(10), 67–76.

